



Model Sinergi TNI dan POLRI dalam Mengatasi Ancaman Keamanan Nasional di Tengah Perang Berlarut

Muhammad Joni¹, Arif Kurniawan²

¹ Program Studi Strategi Kampanye Militer, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, joni994754@gmail.com

² Program Studi Strategi Kampanye Militer, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, arifkurniawan1978@gmail.com

Corresponding Author: joni994754@gmail.com¹

Abstract: *This research is motivated by the lack of a unified doctrine and standardized operational procedures between the TNI and Polri in addressing national security threats within the context of a prolonged conflict. The study seeks to explore the characteristics of these threats, develop a model for operational synergy, and assess the factors that either facilitate or hinder its implementation. Utilizing a qualitative methodology with a case study approach focused on the Strategic Compartment of East Java, data were gathered through comprehensive interviews, field observations, and document analysis involving Kodam V/Brawijaya, Polda Jatim, Lanal Malang, and Lanud Abdul Rachman Saleh. The results indicate that although there is existing technical coordination, an adaptive and integrated framework capable of aligning military and police functions is still lacking. Therefore, establishing a regionally grounded synergy model between TNI and Polri that is responsive to complex, multidimensional threats is crucial for strengthening national defense capabilities.*

Keyword: *TNI-Polri Synergy, Protracted War, National Security Threats*

Abstrak: Penelitian ini didasari oleh belum adanya doktrin maupun prosedur operasional standar (SOP) yang terintegrasi antara TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman terhadap keamanan nasional, khususnya dalam konteks konflik berkepanjangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis ancaman tersebut, merancang model sinergi operasional yang tepat, serta mengevaluasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode studi kasus yang berlokasi di wilayah Kompartemen Strategis Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi dari instansi terkait seperti Kodam V/Brawijaya, Polda Jawa Timur, Lanal Malang, dan Lanud Abdul Rachman Saleh. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun telah terjadi koordinasi teknis antara instansi, belum terbentuk kerangka kerja yang mampu beradaptasi secara optimal dengan karakteristik perang berlarut. Oleh karena itu, diperlukan suatu model sinergi antara TNI dan Polri yang disusun berdasarkan

karakteristik wilayah serta ancaman yang bersifat multidimensional, guna memperkuat sistem pertahanan nasional secara menyeluruh.

Kata Kunci: Sinergi TNI-Polri, Perang Berlarut, Ancaman Keamanan Nasional

PENDAHULUAN

Konflik global berskala besar, seperti intervensi militer Rusia di Ukraina dan ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat terkait upayanya menguasai Greenland, mencerminkan perubahan dinamika dalam sistem keamanan internasional. Perubahan ini berdampak langsung terhadap stabilitas kawasan, termasuk Indonesia. Ketegangan di tingkat global tersebut turut memperbesar potensi ancaman terhadap keamanan nasional, terlebih ketika kondisi dalam negeri masih rentan akibat dampak sosial, ekonomi, dan politik pasca pandemi, serta munculnya tantangan baru dalam bentuk perang informasi. Dalam situasi seperti ini, skenario perang berlarut (*protracted war*) menjadi salah satu kemungkinan ekstrem yang perlu diantisipasi. Skenario ini menggambarkan kondisi ketika kekuatan utama pertahanan, seperti pasukan tempur TNI, mengalami pelemahan, sehingga dibutuhkan strategi pertahanan jangka panjang yang berpusat pada wilayah-wilayah strategis seperti Kompartemen Strategis Jawa Timur. Sayangnya, hingga kini belum terdapat doktrin maupun SOP terpadu yang mampu mengatur sinergi operasional antara TNI dan Polri secara sistematis dan adaptif dalam menghadapi ancaman berkepanjangan tersebut (Winarno & Armawi, 2008).

Kajian-kajian yang tersedia tentang sinergi antara pertahanan dan keamanan nasional umumnya masih berfokus pada tataran struktural normatif lembaga, dan belum menyentuh perancangan model operasional gabungan antara TNI dan Polri dalam konteks perang jangka panjang. Sebagian besar literatur menekankan pentingnya pemisahan peran antara TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai pengemban tugas keamanan dalam negeri pasca reformasi. Namun, belum ada rumusan konkret terkait mekanisme operasional bersama yang dapat diterapkan dalam situasi darurat multidimensi, seperti perang asimetris atau konflik gerilya berkepanjangan (Winarno & Armawi, 2008). Kekosongan teoretis ini menunjukkan pentingnya pengembangan model kolaboratif berbasis ancaman nyata yang melibatkan unsur militer dan nonmiliter secara bersamaan. Hal inilah yang menjadi dasar utama penyusunan artikel ini sebagai kontribusi dalam memperkaya literatur serta merumuskan model kebijakan pertahanan dan keamanan nasional yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika saat ini.

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah: pertama, mengidentifikasi berbagai bentuk ancaman terhadap keamanan nasional dalam konteks perang berlarut, baik yang bersifat fisik seperti terorisme dan sabotase, maupun nonfisik seperti serangan siber dan disinformasi; kedua, menyusun strategi serta model sinergi operasional antara TNI dan Polri yang adaptif dan terintegrasi untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut; dan ketiga, mengevaluasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas implementasi sinergi operasional tersebut sebagai dasar bagi perumusan kebijakan, SOP, dan doktrin bersama. Diharapkan, pencapaian tujuan-tujuan ini dapat mengisi kekosongan konsep dan operasional dalam kebijakan keamanan nasional yang selama ini belum secara spesifik mengatur kerja sama dalam konteks perang berlarut.

Berdasarkan urgensi permasalahan dan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa lemahnya respons kelembagaan terhadap skenario perang berlarut di Indonesia disebabkan oleh belum adanya SOP terpadu serta ketiadaan model operasional yang adaptif. Dalam konteks ini, penelitian ini menegaskan bahwa perumusan strategi sinergis antara TNI dan Polri bukan sekadar penting, tetapi menjadi kebutuhan mendesak yang harus diwujudkan dalam bentuk model yang mempertimbangkan

kondisi ancaman nyata, kapabilitas institusi keamanan, serta sistem komando yang bersifat kolaboratif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai strategis sebagai dasar dalam pengembangan kebijakan nasional yang relevan dengan kompleksitas dan dimensi ancaman masa kini.

METODE

Penelitian ini menyoroti model sinergi operasional antara TNI dan Polri dalam merespons ancaman terhadap keamanan nasional, khususnya dalam situasi perang berlarut di wilayah Kompartemen Strategis Jawa Timur. Fokus utamanya adalah belum adanya doktrin maupun SOP terpadu yang dapat mengarahkan kerja sama TNI-Polri dalam menjalankan langkah preemtif, preventif, maupun represif secara fleksibel dan responsif. Situasi di Kodam V/Brawijaya, Polda Jawa Timur, Lanal Malang, dan Lanud Abdul Rachman Saleh mencerminkan bahwa jenis ancaman yang dihadapi bersifat multidimensional—meliputi sabotase infrastruktur vital, terorisme, separatisme, disinformasi, kejahatan siber, hingga infiltrasi jaringan musuh yang dapat melemahkan stabilitas pemerintahan serta sistem logistik militer.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis, untuk mengkaji secara mendalam dinamika hubungan antarlembaga dalam konteks sinergi operasional. Metode ini dipilih guna memahami interaksi sosial, kebijakan taktis, dan respons kelembagaan terhadap skenario konflik berkepanjangan. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer—melalui wawancara dan observasi langsung terhadap kegiatan lapangan—dan data sekunder, yang meliputi dokumen resmi, laporan strategis, SOP, serta arsip komunikasi dari instansi pertahanan dan keamanan.

Informasi diperoleh dari para pemangku kebijakan operasional di lingkungan TNI dan Polri di Jawa Timur. Informan utama meliputi Asisten Operasi Kodam V/Brawijaya, Kepala Biro Operasi Polda Jatim, Komandan Lanal Malang, dan mantan Kepala Dinas Operasi Lanud Abdul Rachman Saleh. Mereka dipilih secara purposif karena memiliki peran penting dalam struktur komando dan pengalaman langsung dalam pelaksanaan operasi gabungan, yang mencerminkan integrasi darat, laut, udara, serta kepolisian dalam sinergi operasional wilayah Jawa Timur. Keempat informan ini memberikan pandangan yang komprehensif terkait koordinasi vertikal (komando) maupun horizontal (kerja sama lintas fungsi).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur bertujuan menggali pandangan, pengalaman, dan hambatan yang dihadapi dalam sinergi lapangan. Observasi dilakukan dalam kegiatan seperti patroli gabungan dan latihan bersama, guna menangkap interaksi yang tidak tampak dalam wawancara. Studi dokumentasi meliputi penelaahan regulasi, SOP, laporan pelaksanaan, dan notulen rapat. Ketiga metode ini memungkinkan proses triangulasi data dari segi isi dan teknik, sehingga validitas temuan dapat diperkuat.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Reduksi dilakukan sejak awal untuk menyaring informasi penting dari berbagai sumber agar analisis tetap terfokus pada isu-isu strategis seperti efektivitas komando dan koordinasi operasional. Data yang telah disaring disajikan dalam bentuk tabel dan matriks tematik yang menunjukkan keterkaitan antarfaktor. Kesimpulan kemudian dirumuskan secara bertahap dan diverifikasi melalui pencocokan dengan teori serta refleksi terhadap data lapangan, sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa sinergi operasional antara TNI dan Polri dalam menghadapi ancaman perang berlarut belum berjalan secara optimal, terutama karena belum

adanya doktrin dan SOP yang mengatur kerja sama secara resmi dan terstruktur. Data dari Kodam V/Brawijaya, Polda Jawa Timur, Lanal Malang, dan Lanud Abdul Rachman Saleh menunjukkan bahwa sinergi yang terjadi masih sebatas koordinasi teknis, seperti pelatihan bersama, patroli gabungan, dan operasi terbatas dalam menangani konflik sosial dan aksi teror. Padahal, ancaman yang dihadapi bersifat kompleks dan membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai aspek pertahanan dan keamanan.

Secara khusus, penelitian mengungkap bahwa koordinasi intelijen dan pertukaran informasi merupakan aspek sinergi yang cukup berhasil. Misalnya, Polda Jawa Timur aktif berkoordinasi dengan Kodam V/Brawijaya dalam pengumpulan dan validasi data terkait ancaman terorisme dan separatisme. Selain itu, pusat koordinasi bersama dengan BIN berperan penting dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai satuan lapangan. Namun, masih ditemukan kendala pada interoperabilitas sistem komunikasi dan perbedaan persepsi antara TNI dan Polri terkait ancaman, yang menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan efektif.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan sinergi yang ideal dalam menghadapi perang berlarut dan kenyataan di lapangan. Walaupun kedua institusi menyadari pentingnya sinergi, perbedaan doktrin, budaya organisasi, serta hambatan struktural masih menjadi penghalang bagi terciptanya kerja sama yang sistemik dan adaptif. Hal ini membuktikan bahwa ketiadaan kerangka kerja terpadu antara TNI dan Polri dalam menghadapi perang berlarut merupakan masalah nyata yang dapat dibuktikan secara empiris.

Selain itu, penelitian mengungkap bahwa institusi di Jawa Timur belum sepenuhnya siap menghadapi skenario perang berlarut. Kodam V/Brawijaya dan Lanal Malang mengidentifikasi potensi konflik yang berkepanjangan dengan taktik gerilya, perang asimetris, dan infiltrasi jaringan musuh ke wilayah sipil dan birokrasi. Ancaman seperti ini menuntut konsolidasi kekuatan pertahanan yang fleksibel dan berlapis, namun hingga kini belum ada kesiapan sistemik berupa regulasi atau struktur komando alternatif.

Wawancara dengan perwira operasional di Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya mengindikasikan bahwa perang berlarut dipahami sebagai situasi di mana komando pusat lumpuh dan tanggung jawab pertahanan dialihkan ke wilayah kompartemen. Dalam kondisi ini, satuan lokal seperti Polda dan Kodam menjadi penopang utama pertahanan nasional. Namun, tanpa adanya simulasi atau SOP khusus untuk skenario ini, respons yang diberikan masih sektoral dan reaktif, sehingga diperlukan perumusan struktur komando darurat berbasis wilayah agar kesinambungan negara tetap terjaga saat pusat kendali terganggu.

Kondisi tersebut berkaitan langsung dengan permasalahan utama penelitian, yakni ketiadaan sistem terpadu antara TNI dan Polri dalam menghadapi ancaman jangka panjang seperti perang berlarut. Ketidaksiapan dari segi struktur dan doktrin menunjukkan bahwa kekosongan kebijakan ini bukan sekadar persoalan teoritis, melainkan berpengaruh nyata terhadap efektivitas pertahanan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan model sinergi adaptif yang berbasis wilayah strategis sebagai kebutuhan utama dalam sistem keamanan nasional ke depan.

Penelitian juga mengidentifikasi berbagai bentuk ancaman keamanan nasional yang muncul dalam konteks perang berlarut, seperti sabotase objek vital, serangan siber pada infrastruktur penting, terorisme, penyebaran disinformasi, dan infiltrasi ke institusi pemerintahan. Data dari Kodam V/Brawijaya dan Polda Jatim menunjukkan bahwa banyak ancaman tersebut bersifat non-konvensional dan sering kali tidak terdeteksi dengan metode militer konvensional. Hal ini menegaskan perlunya kolaborasi yang lebih luas dan sistem pengawasan terintegrasi antar berbagai aktor negara.

Data di lapangan mengungkap bahwa banyak ancaman bersifat hibrida dan saling terkait. Contohnya, serangan siber tidak hanya mengganggu sistem informasi publik, tetapi juga digunakan untuk memprovokasi masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pemerintah. Sementara itu, infiltrasi musuh ke dalam birokrasi bertujuan melemahkan

anggaran negara melalui praktik korupsi yang sistematis, yang akhirnya berdampak negatif pada logistik pertahanan. Oleh sebab itu, pendekatan yang diterapkan tidak cukup hanya mengandalkan deteksi militer atau operasi penegakan hukum, melainkan harus mengadopsi sistem terpadu yang melibatkan berbagai sektor strategis negara.

Kondisi ini menegaskan betapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Ancaman yang ditemukan tidak hanya memperkuat urgensi sinergi antara TNI dan Polri, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan Indonesia saat ini belum sepenuhnya siap menghadapi perang berlarut secara menyeluruh. Dengan demikian, model sinergi yang diusulkan dalam studi ini bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi fondasi penting untuk adaptasi struktural dalam merespons perubahan ancaman nasional yang terus berkembang.

Tabel 1. Temuan Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian

No	Tujuan Penelitian	Temuan Penelitian
1	Mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman keamanan nasional dalam situasi perang berlarut	Ancaman bersifat multidimensi, mencakup sabotase obyek vital, aksi terorisme, separatisme, serangan siber, disinformasi publik, dan infiltrasi ke birokrasi serta pemerintahan. - Ancaman non-konvensional mendominasi dan sulit dideteksi oleh sistem militer tradisional. - Ancaman digunakan untuk melemahkan moral, sistem logistik, dan kapasitas keuangan negara.
2	Merumuskan strategi dan model sinergi operasional TNI-Polri untuk mengatasi ancaman tersebut	Tidak terdapat doktrin atau SOP operasional terpadu antara TNI dan Polri. - Sinergi yang ada masih bersifat taktis dan insidental, belum menyatu dalam satu sistem komando terpadu. - Perlu dibentuk model sinergi berbasis wilayah dan komando adaptif pada tingkat kompartemen strategis sebagai bentuk respons darurat.
3	Menganalisis faktor pendukung dan penghambat efektivitas sinergi TNI-Polri	Faktor pendukung: kepercayaan antarpersonel, kepemimpinan kolaboratif, kesiapan teknologi komunikasi. - Faktor penghambat: perbedaan budaya organisasi, sistem komando yang berbeda, belum adanya regulasi bersama, serta keterbatasan interoperabilitas sistem informasi dan logistik antara institusi TNI dan Polri.

Diskusi

Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi operasional antara TNI dan Polri dalam menghadapi perang berlarut belum didukung oleh sistem yang terpadu secara doktrinal maupun operasional. Meski ada koordinasi teknis di lapangan, ketiadaan kerangka kerja struktural dan aturan yang jelas menyebabkan respons terhadap ancaman yang kompleks menjadi sporadis dan terpecah-pecah. Ancaman utama seperti sabotase terhadap objek vital, serangan siber, disinformasi, dan infiltrasi ke institusi negara memang teridentifikasi, tetapi belum terintegrasi dalam sebuah mekanisme kolaborasi sistematis antara militer dan kepolisian.

Temuan ini memperkuat hasil studi terdahulu yang mengungkapkan kurangnya regulasi hukum dan prosedur yang jelas dalam mengatur hubungan fungsi antara TNI dan Polri pasca reformasi. Sebagai contoh, Winarno & Armawi (2008) menggarisbawahi bahwa pemisahan peran antara kedua institusi tersebut mengakibatkan lemahnya kapabilitas dalam menghadapi ancaman nasional karena absennya mekanisme operasional bersama. Dalam konteks ini, penelitian sekarang memberikan kontribusi lebih dengan menawarkan perspektif adaptif yang mengajukan model sinergi berbasis wilayah strategis yang responsif terhadap perang berlarut, bukan sekadar aturan sektoral semata.

Hasil penelitian menegaskan pentingnya pendekatan sistemik dalam penyusunan kebijakan keamanan nasional. Pemahaman terhadap berbagai bentuk ancaman dan hambatan sinergi kelembagaan tidak hanya memperkaya literatur pertahanan, tetapi juga menegaskan bahwa kebijakan keamanan harus dirancang dengan fleksibilitas untuk mengantisipasi kondisi dinamis seperti perang berlarut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan

panduan konseptual dan praktis untuk penyusunan doktrin nasional yang mengintegrasikan berbagai elemen kelembagaan.

Implikasi utama dari penelitian ini adalah perlunya kebijakan pertahanan yang melampaui batas sektoral dan disusun berdasarkan ancaman nyata di medan konflik yang multidimensi. Doktrin gabungan TNI-Polri sebaiknya menyatukan pendekatan pertahanan dan penegakan hukum dalam satu kerangka operasi yang dapat diterapkan pada level kompartemen strategis. Hal ini sejalan dengan kebutuhan sistem keamanan nasional yang fleksibel dan adaptif terhadap evolusi ancaman, termasuk operasi hibrida yang menggabungkan aspek fisik dan non-fisik dalam perang asimetris.

Ketidakadaan sinergi doktrinal dan operasional ini tidak terlepas dari faktor sejarah pemisahan institusi TNI dan Polri serta kurangnya kemauan politik dalam merumuskan regulasi terpadu. Selain itu, perbedaan budaya organisasi, sistem komando yang berbeda, dan ketidakharmonisan sistem logistik memperburuk fragmentasi dalam pelaksanaan sinergi di lapangan. Temuan ini menguatkan bahwa masalah utama terletak pada aspek struktural dan budaya organisasi, bukan karena kurangnya niat dari personel di lapangan.

Berdasarkan hasil tersebut, langkah yang diperlukan adalah menyusun doktrin operasional bersama yang dirancang oleh Markas Besar TNI dan Polri, dengan melibatkan para pemangku kepentingan lokal pada tingkat kompartemen strategis. Selain itu, perlu dikembangkan platform komunikasi dan komando yang saling terintegrasi, pelatihan gabungan secara berkelanjutan, serta evaluasi rutin atas kesiapan operasional dalam situasi darurat. Semua upaya ini harus didukung oleh regulasi lintas sektoral yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan operasi terpadu dalam skenario perang berlarut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia belum memiliki doktrin atau SOP operasional yang mengatur sinergi TNI-Polri secara sistematis dalam menghadapi perang berlarut, sehingga koordinasi yang ada masih bersifat taktis dan insidental. Keberadaan struktur komando adaptif di tingkat wilayah strategis sangat penting untuk menjaga kesinambungan pertahanan nasional. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dengan merumuskan model sinergi yang dapat dijadikan dasar kebijakan strategis dan pengembangan SOP gabungan. Meski fokus penelitian terbatas pada Jawa Timur, hasilnya membuka peluang pengujian di wilayah lain dan perluasan kajian aspek legal-politik untuk memperkuat sistem keamanan nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Kobesi, Y., Pekuwali, P., & Rahakbauw, J. (2019). Konflik kewenangan Polri dan TNI dalam penanganan aksi terorisme di Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 8(4), 23–35. <https://consensus.app/papers/konflik-kewenangan-polri-dan-tni-dalam-penanganan-kobesi-pekuwali/102b7a0c22f557f484c28cf750afec5e>
- Setiyawan, E., Mantri, A., & Sumarni, T. (2020). Optimalisasi Sishankamrata melalui penerapan lima pilar keamanan nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 345–360. <https://consensus.app/papers/optimalisasi-sishankamrata-melalui-penerapan-lima-pilar-setiyawan-mantri/2b30534a40cd58869df6392ac6b2b88f>
- Sihotang, T., Susilo, A., & Darmadi, H. (2021). Optimalisasi sinergitas TNI–Polri dalam penanggulangan bencana dan konflik sosial. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(1), 75–92. <https://consensus.app/papers/optimalisasi-sinergitas-tnipolri-dalam-penanggulangan-sihotang-susilo/605816606c0a5830ab8fbd401209e9bd>
- Utami, K. Y., Fadhilah, S., & Rahmat, A. (2019). Penyusunan grand strategy keamanan nasional untuk menghadapi perang non-konvensional. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 9(2), 215–233. <https://consensus.app/papers/penyusunan-grand-strategy-keamanan-nasional-untuk-utami-ky/5b151d507760597d8b366a572a6c960c>

- Widiatmaka, D. (2023). Implikasi keterlibatan pemuda dalam tindakan terorisme terhadap stabilitas nasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 7(1), 17–34. <https://consensus.app/papers/implikasi-keterlibatan-pemuda-dalam-tindakan-terorisme-widiatmaka/d7b2e0c06fca5fa4ab1e86e357ae3078>
- Winarno, B., & Armawi, A. (2008). Hubungan TNI–Polri dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 14(2), 201–218. <https://consensus.app/papers/hubungan-tnipolri-dalam-sistem-pertahanan-dan-keamanan-winarno-armawi/2d11e0c1e63c53d693b68b3e09277e52>
- Zattullah, M., Malik, A., & Rizky, F. A. (2022). Analisis kebijakan keamanan nasional Indonesia ditinjau dari ancaman non-konvensional. *Jurnal Kajian Kebijakan Strategis*, 8(2), 122–140. <https://consensus.app/papers/analisis-kebijakan-keamanan-nasional-indonesia-ditinjau-zattullah-malik/75197aa24f1551a29680ce4b48e7fab0>
- Zulfa, H., Priyanto, E., & Rahayu, N. (2025). The roles of the Indonesian Armed Forces and Police in national hybrid security: Coordination, separation, and transformation. *Indonesian Journal of Strategic Security Studies*, 11(1), 45–66. <https://consensus.app/papers/the-roles-of-the-indonesian-armed-forces-and-police-in-zulfa-priyanto/c9a25e03ca55512eb4dc23c1f236dd44>